



Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi di Sektor Publik

Syahrul Waldi^{1*}, Pitri Andini², Rido Ilahi³, Yulia Hanoselina⁴

¹⁻⁴Universitas Negeri Padang, Indonesia

Korespondensi Penulis: syahrulwaldi@gmail.com*

Abstract. *The Personnel Management Information System (SIMPEG) is a technology-based application used to manage personnel data in a centralized, efficient, and accurate manner. SIMPEG enables various administrative processes, such as payroll, promotions, and employee data management, to be automated, which were previously done manually and prone to errors. This study discusses the concept of SIMPEG, its implementation stages, and its benefits in improving efficiency, data accuracy, service transparency, quick decision-making, and centralized resource management. The research findings show that SIMPEG reduces manual workload, enhances the accuracy and speed of access to employee data, and supports better and more timely decision-making. In addition, SIMPEG increases transparency in administrative processes, reduces operational costs, and strengthens public trust in government institutions. However, the successful implementation of SIMPEG depends on the readiness of technological infrastructure and user training. Therefore, infrastructure development and training are crucial to optimizing SIMPEG use throughout Indonesia.*

Keywords: *SIMPEG, Personnel Information System, Administration, Public sector, Efficiency, Transparency, Data management.*

Abstrak. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) merupakan aplikasi teknologi yang digunakan untuk mengelola data kepegawaian secara terpusat, efisien, dan akurat. SIMPEG memungkinkan berbagai proses administrasi, seperti penggajian, kenaikan pangkat, dan pengelolaan data pegawai, dilakukan secara otomatis yang sebelumnya dilakukan secara manual dan rentan kesalahan. Penelitian ini membahas konsep SIMPEG, tahapan implementasi, serta manfaatnya dalam meningkatkan efisiensi, akurasi data, transparansi pelayanan, pengambilan keputusan cepat, dan pengelolaan sumber daya yang terpusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMPEG mengurangi beban kerja manual, meningkatkan akurasi dan kecepatan akses data pegawai, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan tepat waktu. Selain itu, SIMPEG meningkatkan transparansi dalam administrasi, mengurangi biaya operasional, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi SIMPEG bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi dan pelatihan pengguna. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur dan pelatihan menjadi faktor krusial untuk mengoptimalkan SIMPEG di seluruh Indonesia.

Kata kunci: SIMPEG, Sistem Informasi Kepegawaian, Administrasi, Sektor publik, Efisiensi, Transparansi, Pengelolaan data.

1. PENDAHULUAN

Penggunaan sistem informasi dalam manajemen kepegawaian di sektor publik telah berkembang pesat seiring dengan peningkatan kebutuhan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pelayanan administrasi. Sebagai bagian dari penerapan teknologi digital di sektor publik, Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di berbagai lembaga pemerintah. SIMPEG memungkinkan instansi pemerintah untuk mengelola informasi pegawai secara lebih efektif, termasuk data kehadiran, pangkat, mutasi, dan berbagai aspek administrasi kepegawaian lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik semakin tinggi. Masyarakat mengharapkan pelayanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan transparan. Sistem manual yang sebelumnya digunakan dalam pengelolaan data kepegawaian tidak lagi relevan dengan kebutuhan zaman, karena sering menimbulkan masalah seperti keterlambatan pengolahan data, kurangnya transparansi, dan risiko kesalahan data yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi melalui SIMPEG dianggap menjadi solusi untuk berbagai permasalahan tersebut, memberikan nilai tambah dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik.

Sistem informasi kepegawaian merupakan bagian dari transformasi digital dalam pemerintahan yang dikenal sebagai e- Government, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan kepegawaian. Menurut Nugroho (2008), SIMPEG membantu mempercepat proses pengolahan data kepegawaian, seperti pengelolaan informasi terkait kenaikan pangkat, mutasi, dan pensiun, serta memberikan akses cepat bagi pegawai untuk memeriksa informasi kepegawaian mereka secara real-time. Ini tidak hanya mengurangi beban administrasi manual, tetapi juga meminimalisir kesalahan manusia (human error) dalam pengelolaan data yang bersifat kritis.

Selain itu, sistem informasi ini meningkatkan akuntabilitas manajemen kepegawaian, karena seluruh data yang dikelola bersifat transparan dan dapat diakses oleh pihak-pihak terkait. Dengan adanya SIMPEG, proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya manusia juga dapat dilakukan lebih cepat dan berbasis data yang valid. Seiring perkembangan teknologi informasi, ada dorongan besar bagi instansi pemerintah untuk memperbarui sistem kerja mereka agar sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas diharapkan tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, sektor publik perlu memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk memberikan layanan yang lebih baik.

Pelayanan administrasi kepegawaian menjadi salah satu bidang yang mengalami perombakan besar dalam hal pemanfaatan teknologi. Dengan SIMPEG, berbagai proses yang biasanya memakan waktu lama dan cenderung rawan kesalahan dapat dilakukan lebih efisien. Teknologi ini memudahkan akses terhadap data pegawai, sehingga instansi pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, seperti pengurusan mutasi, kenaikan pangkat, dan pensiun yang dapat dipantau dengan lebih transparan.

Masalah klasik dalam administrasi kepegawaian seperti penyimpanan data yang tidak terstruktur, pengolahan data yang lambat, serta kesalahan dalam pencatatan dan pemeliharaan

data pegawai sering kali menghambat proses pelayanan publik. Dengan SIMPEG, banyak dari masalah ini dapat diminimalisir. Sistem informasi kepegawaian menyediakan platform digital untuk pengelolaan data pegawai secara terintegrasi dan sistematis, sehingga data yang tersedia lebih akurat dan dapat diakses kapan saja.

SIMPEG juga memberikan otomatisasi dalam pengolahan data, yang berarti bahwa banyak proses administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual sekarang dapat dilakukan secara otomatis, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memproses data menjadi jauh lebih singkat. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan penyimpanan data yang lebih aman dan terorganisir, sehingga risiko kehilangan atau kerusakan data dapat dihindari.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam dengan berfokus pada konteks dan dinamika sosial yang terkait dengan fenomena tersebut. Studi literatur atau kajian pustaka merupakan bagian dari metode kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diangkat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Moleong (2007), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berusaha untuk memahami fenomena sosial secara alamiah dengan menekankan pada proses interaksi yang mendalam antara peneliti dengan objek yang diteliti .

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari literatur ilmiah, termasuk artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi. Kajian pustaka memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi dan membandingkan hasil penelitian terdahulu tentang implementasi SIMPEG serta pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan administrasi. Menurut Sugiyono (2016), sumber data sekunder memiliki kelebihan karena memberikan peneliti akses ke data yang sudah tersedia dan dapat dianalisis tanpa harus melakukan pengumpulan data lapangan . Oleh karena itu, literatur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai studi yang relevan dengan implementasi SIMPEG di sektor publik, seperti penelitian yang membahas efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan data kepegawaian.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif dan komparatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara rinci, seperti bagaimana SIMPEG diterapkan di sektor publik dan bagaimana sistem ini mempengaruhi berbagai aspek dalam manajemen kepegawaian. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan hasil-hasil penelitian terdahulu tentang kualitas pelayanan administrasi

sebelum dan sesudah penerapan SIMPEG . Dengan menggunakan dua metode analisis ini, penelitian ini akan menghasilkan gambaran yang lebih lengkap mengenai dampak SIMPEG terhadap peningkatan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pelayanan publik.

3. HASIL

Konsep Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Kata "sistem" berasal dari bahasa Latin "systēma" dan bahasa Yunani "sustēma." Secara sederhana, sistem bisa diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen atau elemen yang saling terhubung. Hubungan ini membantu mengalirkan informasi, materi, atau energi dengan tujuan mempermudah pencapaian suatu tujuan tertentu. Menurut Fatansyah (2015:11) bahwa "Sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dengan satuan fungsi dan tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu".

Menurut Fajri (2017), informasi merupakan data yang telah diolah dan disajikan dalam bentuk yang lebih bermakna. Data ini kemudian menjadi bermanfaat bagi penerimanya karena memiliki nilai dan relevansi. Informasi tersebut biasanya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, sehingga penerima merasa lebih percaya diri dalam memilih langkah yang tepat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 1 Bab 1, pegawai negeri adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan tertentu, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diberikan tugas negara, serta menerima gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) adalah sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai data pegawai di suatu perusahaan atau instansi, dengan tujuan mendukung tercapainya target yang telah ditentukan. SIMPEG mencakup pengelolaan data pegawai, seperti pendataan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), perencanaan formasi, penggajian, penilaian angka kredit, mutasi pegawai, serta pembuatan laporan.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan mengolah data pegawai, menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pegawai maupun instansi pemerintahan. Di era modern ini, SIMPEG menjadi sangat penting dalam mempercepat akses informasi terkait kepegawaian, karena pegawai kini dianggap sebagai aset vital dalam menjalankan pemerintahan. Dengan SIMPEG, administrasi kepegawaian dapat berjalan dengan baik, baik di tingkat kecil maupun besar dalam konteks pemerintahan yang efektif.

Pelaksanaan SIMPEG diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya pada Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan pentingnya sistem informasi ASN untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam pengambilan keputusan manajemen ASN. Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagai pemerintah pusat, juga berperan dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN, sesuai dengan Pasal 47 huruf (c) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014. Selain itu, BKN bertanggung jawab dalam mengelola sistem informasi kepegawaian berbasis kompetensi, yang didukung oleh sistem arsip yang terintegrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 huruf (d).

Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) merupakan suatu inovasi teknologi yang dikembangkan untuk mengoptimalkan proses administrasi dan manajemen sumber daya manusia dalam lingkungan organisasi. Aplikasi ini dirancang dengan tujuan utama untuk menyediakan platform terintegrasi yang memfasilitasi akses cepat, presisi tinggi, dan pemutakhiran real-time terhadap data kepegawaian.

SIMPEG mengimplementasikan mekanisme pencarian data yang sophisticated, memungkinkan ekstraksi informasi berdasarkan parameter-parameter yang ditentukan pengguna. Fungsionalitas utama sistem ini mencakup modul-modul untuk pembaruan data aktivitas pegawai, manajemen dokumen digital, serta pengelolaan berkas pengajuan. Lebih lanjut, SIMPEG juga mengintegrasikan fitur-fitur esensial seperti sistem evaluasi kinerja, penilaian angka kredit, serta modul untuk memproses kenaikan pangkat dan jabatan. Salah satu aspek krusial yang diakomodasi oleh SIMPEG adalah manajemen korespondensi, yang meliputi pencatatan dan pelacakan surat masuk serta keluar. Fitur ini berkontribusi signifikan terhadap efisiensi komunikasi internal dan eksternal organisasi. Selain itu, SIMPEG juga dilengkapi dengan kapabilitas untuk memfasilitasi transfer data antar departemen, yang berperan vital dalam meningkatkan kolaborasi dan sinkronisasi informasi dalam struktur organisasi.

Implementasi SIMPEG diproyeksikan dapat menghasilkan peningkatan substansial dalam efektivitas dan efisiensi manajemen kepegawaian, sekaligus meminimalisir potensi kesalahan manusia dalam pengelolaan data. Sistem ini menawarkan solusi komprehensif untuk tantangan-tantangan administratif yang sering dihadapi dalam konteks manajemen sumber daya manusia di era digital.

Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) bukan hanya

tentang pengoperasian program untuk memasukkan data, tetapi juga harus didukung oleh efisiensi dan ketelitian agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Penerapan SIMPEG memberikan berbagai keuntungan, seperti kemudahan dalam melacak informasi pegawai secara cepat, mempermudah pembuatan laporan berkala, serta memberikan gambaran mengenai pegawai yang akan pensiun atau naik pangkat, termasuk daftar kenaikan gaji secara berkala. Selain itu, SIMPEG mempermudah pekerjaan yang terkait dengan kepegawaian, seperti akses cepat dan akurat terhadap informasi pegawai, perencanaan penyebaran pegawai, serta perencanaan penerimaan pegawai baru (Rusdiana, 2019).

Sebagai aplikasi pengelola informasi kepegawaian, SIMPEG memiliki banyak keunggulan. Proses komputerisasi mempercepat pengolahan data, dan validasi serta kontrol yang ada menjamin keakuratan informasi. Data yang tersimpan dapat diakses kapan saja, membuatnya lebih ringkas dan mudah ditemukan. Keamanan informasi lebih terjaga, pemeliharaan data kepegawaian menjadi lebih sederhana, dan aplikasi ini juga membantu dalam menilai kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas kepegawaian (Febrianti & Nurlaila, 2024).

SIMPEG membantu dalam pengelolaan data kepegawaian dengan menyediakan akses mudah dan cepat ke informasi penting seperti SK, ijazah, KTP, dan kartu keluarga. Penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) dimulai dengan persiapan infrastruktur teknologi, yang mencakup perangkat keras seperti komputer, server, dan jaringan internet, serta perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan sistem ini. Tahap selanjutnya adalah pelatihan dan sosialisasi bagi operator sekolah, kepala sekolah, dan guru untuk memastikan mereka dapat menggunakan SIMPEG dengan efektif. Setelah itu, dilakukan migrasi data dari format manual atau sistem lama ke dalam SIMPEG. Uji coba dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan semua fitur berfungsi dengan baik, diikuti dengan pelaksanaan penuh sistem setelah uji coba berhasil. Manfaat yang dirasakan setelah penerapan SIMPEG mencakup akses cepat ke data pegawai yang diperlukan untuk intansi.

Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mengelola data kepegawaian secara terstruktur. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan layanan administrasi kepegawaian, khususnya dalam hal data pegawai. Dengan SIMPEG, semua informasi pegawai tersimpan dalam satu basis data yang memudahkan akses dan mempercepat proses administrasi kepegawaian.

Dalam SIMPEG, terdapat beberapa fitur yang memudahkan pengguna dalam mengelola data pegawai, antara lain:

1. Pengelolaan Data Umum (Master Data): Fitur ini berisi beberapa sub-menu untuk mengakses dan mengelola data referensi yang digunakan oleh sub-aplikasi lainnya.
2. Pengelolaan Data Pegawai: Bagian ini mencakup sub-menu yang mengakses data pegawai serta struktur organisasi dan unit kerja.
3. Pengelolaan Data Kedinasan: Berisi sub-menu untuk mengelola data seperti Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan cuti pegawai.
4. Sistem Peringatan Kepegawaian: Menyediakan peringatan dini terkait penggajian, kenaikan pangkat, dan pensiun.
5. Pengelolaan Laporan: Memungkinkan akses ke berbagai sub-aplikasi untuk mengelola laporan umum, laporan pelatihan, dan laporan kedinasan.
6. Manajemen Pengguna Aplikasi (Administrator): Bagian ini mengelola daftar pengguna dan memungkinkan perubahan data seperti menambah, mengubah, atau menghapus pengguna.

Basis data kepegawaian ini dirancang sebagai sistem interaktif, di mana pengguna dapat berkomunikasi langsung dengan komputer untuk mengakses data kepegawaian. Komputer memberikan tanggapan langsung dalam bentuk tampilan atau laporan yang dapat ditampilkan di layar atau dicetak melalui printer. Dengan sistem interaktif ini, informasi yang dikumpulkan dapat diolah menjadi laporan dan grafik yang lebih mudah dipahami.

Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi di Sektor Publik

Penggunaan sistem informasi kepegawaian di sektor publik di Indonesia memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan administrasi. Menurut beberapa ahli, implementasi teknologi informasi dalam manajemen kepegawaian dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi proses administrasi, mengurangi kesalahan manual, serta mempercepat waktu penyelesaian tugas administrasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sunarto (2020), disebutkan bahwa sistem informasi kepegawaian memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih terstruktur dan mudah diakses, sehingga memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Selain itu, Wahyudi (2018) menekankan bahwa transparansi dalam layanan publik dapat ditingkatkan dengan penggunaan sistem yang berbasis teknologi, yang secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Namun, tantangan dalam adopsi sistem ini adalah kesiapan sumber daya manusia serta infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah

Indonesia.

Secara keseluruhan, sistem informasi kepegawaian memiliki dampak positif pada kualitas layanan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada faktor pendukung lain seperti pelatihan pengguna dan pembenahan infrastruktur.

1. Efisiensi Proses Administrasi

Penggunaan system informasi kepegawaian di sektor publik Indonesia secara signifikan meningkatkan efisiensi administrasi dengan mengurangi beban kerja manual yang sering memakan waktu dan rentan kesalahan. Sebelumnya, pencatatan data pegawai dilakukan secara manual, berisiko tinggi terhadap kesalahan dan duplikasi. Dengan sistem informasi kepegawaian, proses seperti absensi, pengajuan cuti, dan kenaikan pangkat menjadi digital dan otomatis, mengurangi intervensi manual dan mempercepat alur kerja. Data pegawai dapat diakses secara terpusat dan real-time, sehingga mempersingkat proses administrasi yang biasanya memakan waktu lama. Efisiensi ini memungkinkan alokasi sumber daya manusia ke tugas strategis dan meningkatkan pelayanan publik secara keseluruhan, mencerminkan birokrasi yang lebih profesional dan modern.

2. Akurasi Data

Penggunaan sistem informasi kepegawaian di sektor publik Indonesia sangat meningkatkan akurasi data, yang berdampak positif pada kualitas pelayanan administrasi. Sebelum sistem ini diterapkan, pengelolaan data pegawai secara manual rentan terhadap kesalahan seperti human error, duplikasi, dan kehilangan dokumen, yang dapat mengganggu administrasi dan mempengaruhi hak pegawai. Dengan sistem informasi, data diolah secara otomatis dan terstruktur, mengurangi kesalahan manual dan memastikan informasi selalu terupdate secara real-time. Akurasi data ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan perencanaan sumber daya manusia yang lebih efektif, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan publik dan memastikan pelayanan administrasi yang lebih efisien dan terpercaya.

3. Transparansi Pelayanan

Penggunaan sistem informasi kepegawaian di sektor publik Indonesia memainkan peran kunci dalam meningkatkan transparansi pelayanan administrasi, yang berkontribusi pada kualitas layanan secara keseluruhan. Sebelumnya, proses administrasi sering mengalami ketidakjelasan dan tertutup informasi, membuat pegawai dan masyarakat sulit memantau status permohonan atau layanan administratif mereka, seperti cuti atau kenaikan pangkat. Hal

ini dapat menimbulkan frustrasi dan memperlambat proses.

Dengan sistem informasi kepegawaian, transparansi meningkat secara signifikan. Pegawai dan masyarakat dapat memantau status administrasi mereka secara real-time melalui platform digital, menghilangkan kebutuhan untuk menanyakan status secara manual dan mempercepat proses. Keterbukaan ini menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel, meminimalkan risiko penyimpangan seperti korupsi atau nepotisme, karena setiap langkah dalam proses administrasi dapat dipantau dan ditelusuri.

Selain itu, transparansi ini mempermudah audit dan evaluasi kinerja administrasi, memungkinkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan data yang akurat. Kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah meningkat, karena masyarakat merasa dilayani dengan lebih adil dan sesuai prosedur. Secara keseluruhan, sistem informasi kepegawaian meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dengan mendorong akuntabilitas, mempercepat proses, dan memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

4 Pengambilan Keputusan yang Cepat

Penggunaan sistem informasi kepegawaian di sektor publik Indonesia secara signifikan mempercepat proses pengambilan keputusan oleh pimpinan instansi. Sebelumnya, keputusan manajerial sering terhambat oleh lambatnya akses data dan informasi kepegawaian, karena pengumpulan data manual dan pencarian dokumen yang memakan waktu. Sistem informasi kepegawaian mengatasi masalah ini dengan menyediakan akses data digital yang cepat dan real-time, memungkinkan pimpinan untuk membuat keputusan secara efisien dan tepat waktu. Data terkait riwayat kinerja, absensi, dan evaluasi pegawai dapat diakses dengan mudah, sehingga keputusan menjadi lebih objektif dan berbasis data.

Kecepatan akses ini sangat penting dalam situasi darurat, di mana keputusan harus diambil dengan cepat. Sistem ini juga memfasilitasi integrasi antarunit, memperlancar aliran informasi dan koordinasi, serta memungkinkan pengambilan keputusan strategis yang melibatkan berbagai pihak. Secara keseluruhan, sistem informasi kepegawaian meningkatkan kualitas dan kecepatan keputusan, sehingga instansi pemerintah menjadi lebih efektif, responsif, dan adaptif terhadap tantangan di sektor publik.

5. Pengelolaan Sumber Daya yang Terpusat

Penggunaan sistem informasi kepegawaian di sektor publik Indonesia berperan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia yang lebih terpusat dan efisien. Sebelum sistem ini diterapkan, data pegawai sering tersebar di berbagai departemen, baik dalam bentuk manual

maupun digital, yang menyulitkan akses, pertukaran informasi, dan menyebabkan ketidakkonsistenan data.

Sistem informasi terpusat mengatasi masalah ini dengan menyimpan seluruh data pegawai dalam satu platform terintegrasi, memungkinkan akses real-time oleh berbagai unit. Hal ini meningkatkan kolaborasi antarunit, mempercepat proses administrasi seperti penggajian, promosi, dan penilaian kinerja, serta memastikan akurasi dan konsistensi data. Dengan pengelolaan data yang terpusat, pemerintah dapat merencanakan dan mengelola sumber daya manusia dengan lebih strategis, meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan kualitas pelayanan administrasi di sektor publik.

6. Pengurangan Biaya Operasional

Penggunaan sistem informasi kepegawaian di sektor publik Indonesia secara signifikan mengurangi biaya operasional dengan mengalihkan proses administrasi dari penggunaan dokumen fisik ke platform digital. Sebelumnya, pencatatan dan pengelolaan data pegawai memerlukan banyak kertas, perlengkapan administrasi, dan ruang penyimpanan, serta berisiko kehilangan atau kerusakan dokumen. Dengan digitalisasi, pengeluaran untuk kertas, tinta, dan perlengkapan kantor berkurang, sementara ruang penyimpanan fisik tidak lagi diperlukan. Sistem ini mempercepat pencarian dan pemrosesan data, mengurangi waktu dan tenaga kerja yang dibutuhkan, serta meminimalkan kesalahan dan biaya perbaikan. Automasi proses seperti pengajuan cuti dan evaluasi kinerja juga mengurangi beban kerja administratif, memungkinkan pegawai untuk fokus pada tugas yang lebih strategis.

Penggunaan sistem informasi kepegawaian juga meningkatkan efisiensi jangka panjang dengan memungkinkan analisis kebutuhan pelatihan yang lebih tepat. Secara keseluruhan, sistem ini mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dengan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan memberikan pelayanan yang lebih cepat dan akurat kepada masyarakat.

7. Peningkatan Kepercayaan Publik

Penggunaan sistem informasi kepegawaian di sektor publik Indonesia secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik dengan memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan administrasi. Sebelum sistem ini diterapkan, pelayanan publik sering dianggap lambat dan tidak transparan, memicu ketidakpercayaan masyarakat akibat proses manual yang tertutup, berisiko kesalahan, dan potensi korupsi. Sistem informasi kepegawaian mengatasi

masalah ini dengan menyediakan platform terintegrasi yang memungkinkan pemantauan real-time dari proses administrasi seperti pengajuan cuti atau promosi. Transparansi ini memberi masyarakat kepercayaan bahwa proses dan keputusan didasarkan pada data yang dapat diverifikasi, mengurangi potensi kesalahan atau manipulasi.

Akuntabilitas meningkat karena setiap tahap proses terekam dan dapat dilacak, memudahkan evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan yang lebih objektif. Sistem ini juga mempermudah pemantauan penggunaan anggaran dan sumber daya manusia, memperjelas bagaimana pegawai dikelola dan sumber daya publik digunakan. Keterbukaan informasi ini membangun kepercayaan masyarakat bahwa pelayanan publik menjadi lebih profesional, efisien, dan adil. Secara keseluruhan, sistem informasi kepegawaian memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat dengan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan administrasi.

4. KESIMPULAN

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) merupakan solusi teknologi yang sangat penting dalam mendukung efisiensi dan transparansi administrasi kepegawaian di sektor publik. Dengan mengotomatisasi berbagai proses, mulai dari pengelolaan data pegawai, penggajian, hingga kenaikan pangkat, SIMPEG berhasil mengatasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam sistem manual, seperti kesalahan pencatatan dan keterlambatan pemrosesan data. Penerapan SIMPEG memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan efisiensi proses administrasi, akurasi data yang lebih tinggi, transparansi layanan yang lebih baik, dan percepatan dalam pengambilan keputusan.

Keunggulan SIMPEG terlihat dari kemampuannya dalam menyimpan data secara terpusat dan terstruktur, sehingga memudahkan akses dan pengelolaan informasi pegawai secara real-time. Selain itu, penggunaan SIMPEG juga membantu menurunkan biaya operasional karena mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan proses manual, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah melalui transparansi yang lebih baik.

Meskipun demikian, keberhasilan penerapan SIMPEG sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi di berbagai instansi. Oleh karena itu, pelatihan pengguna dan pengembangan infrastruktur harus menjadi fokus utama dalam implementasi SIMPEG agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, SIMPEG tidak hanya membantu memperbaiki administrasi kepegawaian, tetapi juga mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif, efisien,

dan akuntabel.)

DAFTAR REFERENSI

- Askal Basir, M. (2021). Pengaruh penggunaan sistem informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *JEK: Jurnal Efek Komunikasi*, 2(2).
- Fakhrudin, E., Umar, U., & Yuliadi, I. (2023). Efektivitas penerapan SIASN terhadap kualitas pelayanan administrasi kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat. *Ganec Swara*, 17(4), 1430–1440.
- Komalasari, S., Hanafi, I., & Setyowati, E. (2014). Aplikasi program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 613–619.
- Laia, O., Halawa, O., & Lahagu, P. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen terhadap pelayanan publik. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, 1(1), 70–76. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.15>
- Narotama, A. T., & Ikasari, I. H. (2023). Mengeksplorasi tantangan dan manfaat implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. In *Bisnis dan Pendidikan*, 1(1). <https://jurnalmahasiswa.com/index.php/teknobis>
- Novianto, E. (2023). Audit sistem informasi pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) menggunakan model framework COBIT 4.1. *Jurnal Manajemen Informatika dan Sistem Informasi (MISI)*, 6(1). <http://e-jurnal.stmiklombok.ac.id/index.php/misi>
- Nuraini, N., & Ahmad, I. (2021). Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian menggunakan metode Key Performance Indicator untuk rekomendasi kenaikan jabatan (Studi kasus: Kejaksaan Tinggi Lampung). *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTISI)*, 2(3).
- OLTRIS, M. P., Rares, J. J., & Posumah, J. H. (n.d.). Pengaruh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terhadap pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado.
- Puspitasari, N., Tampubolon, W., & Taruk, M. (2021). Analisis metode EUCS dan HOT-FIT dalam mengevaluasi penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 4(1).
- Rohman, F., & Mamun, M. (2019). Rancang bangun Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis web pada Kementerian PPN/Bappenas. *Indonesia Journal on Networking and Security*, 8(4).
- Venika, F., & Hadinata, N. (2023). Perancangan sistem manajemen karyawan berbasis website pada PT Suryabumi Agrolanggeng. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP)*, 6(11).
- Wijaya, A., & Damayanti, N. H. (2022). Rancang bangun Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis web (Studi kasus: PT Sembilan Hakim Nusantara). *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTISI)*, 3(2), 9–17.

Yahya, A. S. (2017). Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 11(2).